

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan hak kekebalan dan akibat hukum atas kasus penyerangan Diplomat Nigeria kepada Staf Imigrasi Indonesia ditinjau dari Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif kemudian dituangkan dalam bentuk preskripsi untuk menganalisis benar atau tidaknya suatu peristiwa dalam pandangan hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa terdapat penyalahgunaan atas hak kekebalan yurisdiksi pidana negara penerima sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1961 yang dilakukan dengan melakukan pelanggaran hukum dan peraturan negara penerima sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Konvensi Wina 1961 yang mewajibkan perwakilan diplomatik untuk menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima tanpa mengurangi hak kekebalan dan keistimewaan yang dimilikinya. Tindakan tidak bersikap kooperatif kepada pejabat berwenang dan melakukan penyerangan terhadap pejabat berwenang yang dapat dikenakan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan akibat hukum berupa pernyataan *persona non grata* terhadap perwakilan diplomatik tersebut dan melahirkan kewajiban pertanggungjawaban atas pelanggaran yang bersifat immateril sebagaimana ketentuan dalam Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts dengan memberikan pernyataan secara resmi disertai dengan memberikan jaminan tidak adanya pengulangan atas tindakan yang telah dilakukan.

Kata kunci: penyalahgunaan kekebalan diplomatik, tanggung jawab negara, akibat hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze the form of the abuse of diplomatic immunity and legal consequences for Nigerian Diplomat attacks on Indonesian Immigration Official according to the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. In this study, normative legal research was used with a statute approach and a case approach. Sources of data used are secondary data obtained through library research. Data is analyzed qualitatively then generated in the prescription form to analyze whether an event is true or not according to a legal point of view. Based on the results of this study, the author concludes that there is an abuse of diplomatic immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State as regulated in Article 31 of the 1961 Vienna Convention that committed by violating the laws and regulations of the receiving State as regulated in Article 41 of the 1961 Vienna Convention which requires to respect the laws and regulations of the receiving State without prejudice to their privilege and immunities. The act of not being cooperative with Official and carrying out attacks on Official may be subject to Article 170 paragraph (1) of the Indonesia Criminal Code, which could bring legal consequences in the form of a declaration of persona non grata to the diplomatic representative and give the obligation of responsibility according to the provisions in the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts also provide a guarantee that there will be no repetition of the actions that have been taken.

Keywords : *abuse of diplomatic immunity, state responsibility, legal consequences*